

**Latar Belakang Penggunaan Private Military and Security Companies
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam United Nations Mission
Assistance in Afghanistan tahun 2007-2015**

Muhammad Haikal Efendi

Departemen Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

Email: haikallaki@outlook.com

Abtrak

Sebagai salah satu kawasan konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda, Afghanistan masih mengalami peperangan dan konflik. PBB membentuk operasi perdamaian United Nations Assistance Mission in Afghanistan atau UNAMA, yang berfokus untuk mempertahankan situasi Afghanistan yang kondusif di luar kawasan medan perang, serta mengawal pembangunan infrastruktur sipil. Di satu sisi, UNAMA sebagai satu bentuk operasi perdamaian membutuhkan jumlah personil yang besar, dan di sisi lain, PBB kenyataannya tidak memiliki jumlah pasukan perdamaian yang cukup untuk dikerahkan di daerah operasi perdamaianya yang tidak hanya terletak di Afghanistan saja. Terbukti, PBB ternyata menggunakan Private Military and Security Companies atau PMSCs yang menyediakan jasa dan peralatan keamanan yang bisa memastikan UNAMA sukses di Afghanistan.

Kata Kunci: Afghanistan, PMSCs, PBB, UNAMA, Aktor non-negara

Abstract

As one of the conflict areas that has not shown signs of abating, Afghanistan is still experiencing war and conflict. The United Nations formed a United Nations Assistance Mission in Afghanistan or UNAMA peace operation, which focused on maintaining a conducive Afghan situation outside the battlefield, and guarding the construction of civil infrastructure. On the one hand, UNAMA as a form of peace operation requires a large number of personnel, and on the other hand, the UN in fact does not have enough peacekeeping forces to be deployed in the area of its peace operations which are not only located in Afghanistan. Evidently, the UN turned out to use Private Military and Security Companies or PMSCs that provide security services and equipment that could ensure UNAMA success in Afghanistan.

Keywords : *Afghanistan, PMSCs, United Nations, UNAMA, Non-state actor*

Sebagai salah satu kawasan konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda, Afghanistan menjadi satu titik panas yang masih mengalami peperangan dan konflik. Dimulai dari Invasi Amerika Serikat (AS) ke Afghanistan setelah serangan 11 September 2001, perang yang awalnya untuk membongkar jaringan kelompok teroris Al-Qaeda, yang diyakini memiliki basis operasi di Afghanistan ini telah berkembang menjadi perang terbuka berskala besar. Dari yang awalnya menurunkan tentara sebanyak 8300 personel pada 2003, jumlah tentara terus ditingkatkan hingga pada 2011 mencapai angka 140.000 pasukan asing yang beroperasi di bawah komando International Security Assistance Force (ISAF) dan pemerintah AS. Dari 140.000 personel yang dikerahkan pada 2011, sebagian besar pasukan berasal dari AS. Selain ISAF dan pemerintah AS, NATO juga terlibat dalam ISAF pada Agustus 2003, dan kemudian mengambil alih komando pasukan dari ISAF. Pada tahap ini, ISAF memasukkan pasukan dari 43 negara dengan anggota NATO yang memberikan sisa jumlah pasukannya.

Selain NATO, PBB juga merupakan organisasi internasional yang memiliki peran besar di Afghanistan selama perang berlangsung. Di Afghanistan, misi yang diemban oleh UN Blue Helmet ini dikenal dengan istilah United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), yang berfungsi sebagai pendukung, pengamat, dan pemberi dana untuk membangun perdamaian di Afghanistan. UNAMA menyatakan bahwa fungsi utama UNAMA di Afghanistan adalah untuk membangun budaya damai, termasuk: mendukung pencegahan konflik dan resolusi, serta proses perdamaian; mempromosikan inklusi dan kohesi sosial; memperkuat kerjasama regional dalam mendukung perdamaian dan stabilitas; mendukung proses *peacebuilding* dan pemulihan yang peka gender; dan penerapan keadilan transisional; memperkuat negara Afghanistan dengan mempromosikan kepemilikan nasional dan lembaga-lembaga akuntabel yang dibangun di atas aturan hukum, tata pemerintahan yang baik, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan yang memberikan layanan dasar kepada penduduk di seluruh negeri; dan mencapai koherensi yang lebih besar antara prioritas pemerintah Afghanistan dan upaya masyarakat sipil internasional di bidang perdamaian, pemerintahan dan pembangunan.

Di sisi lain, PBB tidak menyertakan pasukan perdamaian atau UN Blue Helmet di UNAMA. Sebagaimana laporan dari CS Monitor, menteri pertahanan pemerintah transisi Afghanistan Mohammad Qassim pada 2001 telah meminta pengiriman 5000-6000 pasukan perdamaian untuk membantu pengamanan Kabul selama perang berlangsung (Jordan 2018). Sebagaimana pernyataan dari salah satu petinggi UN Blue Helmet, perang Afghanistan memiliki tingkat bahaya yang tinggi dan bukan sekedar konflik kemanusiaan ataupun perang sipil. Menurutnya, jaminan bahwa UN Blue Helmet bisa sukses di Afghanistan sangat kecil dan resiko yang dihadapi terlalu tinggi (Jordan 2018). David Phillips, wakil direktur Pusat Tindakan Pencegahan di Dewan Hubungan Luar Negeri PBB, juga mengatakan bahwa PBB tidak ingin bertanggung jawab atas misi di Afghanistan berisiko tinggi, tetapi jaminan keberhasilan rendah (Jordan 2018). Sebaliknya, Dewan Keamanan PBB pada 2001 memberikan persetujuan kepada koalisi yang dipimpin Inggris, termasuk kontingen dan pasukan Uni Eropa pertama dari beberapa negara Muslim, sebagai ganti dari UN Blue Helmet (Jordan 2018).

Perserikatan Bangsa Bangsa dan Private Military Security and Companies

PBB tercatat menggunakan IDG Security, PMSCs yang bertugas sebagai perlindungan dengan penggunaan senjata mereka. Kontrak ini menjadi kontrak terbesar untuk tugas keamanan, lebih dari 9 juta dollar Amerika untuk periode bulan November tahun 2010 sampai November tahun 2011 (Oswald et al. 2010). Salah satu kasus dari penggunaan PMSCs oleh PBB yang cukup dikenal, pada bulan Oktober tahun 2010, pasukan Gurkha menembak empat penyusup di dalam markas besar PBB di Herat. Sebenarnya IDG Security juga berperan dalam penembakan penyusup ini, tetapi sangat jarang sekali disebutkan bahwa mereka juga terlibat (Oswald et al. 2010). Selain IDG Security, PMSCs lain yang tercatat hadir di Afghanistan adalah Airscan, Academi (sebelumnya dikenal dengan nama Blackwater), Custer Battle of Fairfax, Jorge Scientific Corporation, KBR, Aegis Defense Services (AS), Global Risk, dan International Intelligence Ltd. (Inggris).

PMSCs ini berasal dari perusahaan-perusahaan yang telah menandatangani kontrak dengan Departemen Pertahanan AS dan NATO. KBR contohnya, telah menandatangani kontrak dan dianugerahi dana senilai \$ 100 juta pada tahun 2002 untuk membangun kedutaan AS baru di Kabul, Afghanistan, dari Departemen Luar Negeri AS. KBR juga telah dianugerahi 15 pesanan Program Logistik Perambahan Sipil (LOGCAP) senilai lebih dari \$ 216 juta untuk pekerjaan di bawah Operasi Enduring Freedom, nama militer untuk operasi di Afghanistan. Ini termasuk mendirikan kamp-kamp tentara di Kandahar dan Pangkalan Udara di Bagram dan melatih pasukan asing dari Republik Georgia. Aegis Defense Services, pada 2011 dianugerahi kontrak \$ 497 juta oleh Departemen Luar Negeri AS untuk melakukan operasi keamanan di Kedutaan Besar AS di Kabul, Afghanistan. Surat kabar The Guardian melaporkan bahwa mulai tahun 2011 dan seterusnya Aegis Defense Service merekrut tentara dari negara-negara Afrika, seperti Sierra Leone dan Rwanda (Ross 2016).

Memang keterlibatan PMSCs dalam kasus penggunaan senjata sangat jarang terlihat pada laporan resmi PBB. Bahkan dalam UNAMA sendiri dilaporkan bahwa seorang staf PBB bagian *political affairs* yang terbang ke Faizabad untuk mengecek situasi yang ada, staf itu terkejut melihat para pekerja dari Global Risks Strategies membawa senjata (Pingeot 2011). Meskipun Global Risks Strategies pada waktu itu belum dikontrak untuk konteks keamanan, pekerja mereka lebih dari siap untuk menggunakan serangan bersenjata di saat hal itu tiba-tiba diperlukan. Karena kekurangan ketransparan dari penggunaan PMSCs oleh PBB inilah biasanya terjadi kesalahpahaman yang berkaitan dengan jasa PMSCs apa yang digunakan, seberapa besar cakupannya dan bagaimana bisa terjadi hubungan antara PBB dan PMSCs dalam sebuah misi. PMSCs banyak digunakan oleh PBB dalam misi *peacekeeping*, *humanitarian* dan *political missions* seperti UNAMA ini.

Departemen Urusan Politik PBB memimpin sejumlah misi politik di Afrika, Asia Selatan dan Tengah dan Timur Tengah. Misi-misi ini, yang dituntut dengan tugas diplomatik dan *peacebuilding* untuk mencegah atau menyelesaikan konflik, dilakukan bersama dengan pembangunan PBB dan entitas kemanusiaan. Beberapa dari misi ini saat ini berada di lingkungan operasi yang tidak bersahabat, dan salah satunya adalah Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA) (Østensen 2013). Berbeda dengan kawasan-kawasan lain yang menjadi pusat pengiriman pasukan perdamaian, Afghanistan secara umum merupakan kawasan yang memiliki tingkat ketidakamanan yang tinggi. Ini dikarenakan sifat konflik di Afghanistan yang telah mencapai titik

konflik bersenjata terbuka, atau bahkan bisa dikatakan perang terbuka. Karena itu, PBB sebagai organisasi antarnegara yang hanya berfokus pada mempertahankan kondisi aman dan damai di suatu kawasan, tetapi bukan menciptakan perdamaian itu sendiri (*peacekeeping* bukan *peacemaking*) (Østensen 2013).

Masalahnya, konflik di Afghanistan ini juga mencakup lingkup *irregular warfare* di dalam prakteknya, dan seringkali pihak-pihak yang terlibat menggunakan strategi seperti bom bunuh diri dan serangan mendadak di kawasan terbuka. Maka dari itu, PBB pun melihat bahwa pasukan perdamaian dalam beberapa tahapan tidak memiliki cukup kemampuan untuk mencapai tujuan mereka di Afghanistan (Østensen 2013). Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa penggunaan PMSCs di Afghanistan oleh PBB didasari oleh kebutuhan akan keamanan, termasuk penilaian risiko dan perencanaan tetapi juga perlindungan fisik. Dengan keterbatasan personil dan persenjataan di lapangan, PBB melihat bahwa mereka membutuhkan suatu entitas yang bisa bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas khusus yang dapat ditambah atau diganti, dan PBB melihat bahwa PMSCs menghadirkan layanan tersebut (Wulf 2005).

Efektifitas dan Tugas Private Military Security Companies

Beberapa studi penelitian lapangan memberikan informasi yang dapat diandalkan yang menunjukkan bahwa meskipun layanan PMSCs umumnya terkait dengan keamanan, penggunaan dan kegiatan mereka tidak menghasilkan dampak positif yang berlebihan dalam lingkungan keamanan umum negara tersebut (Wulf 2005). Sebaliknya, penelitian telah mencatat bahwa sejumlah besar orang bersenjata, kendaraan dan senjata, serta hubungan antara PMSCs dan milisi, menciptakan perasaan tidak percaya, takut dan tidak aman di antara penduduk setempat dan mengirimkan pesan bahwa keamanan bukanlah barang publik, tetapi komoditas untuk orang asing dan orang kaya Afghanistan (Lilly 2000).

Perlu dicatat di sini bahwa, terlepas dari informasi umum tentang insiden hak asasi manusia, ini adalah area yang tidak dilaporkan di mana kurangnya statistik dan pemeriksaan substansial diamati. Kesulitan praktis, seperti kesulitan untuk membedakan antara kontraktor dan aktor bersenjata lainnya, telah dikatakan menyulitkan proses pelaporan insiden secara akurat dan pelanggaran hak asasi manusia oleh warga negara Afghanistan dan LSM (Lilly 2000). Bahkan lembaga-lembaga hak asasi manusia seperti Kelompok Kerja PBB tentang tentara bayaran selama misinya di negara itu pada tahun 2009, tidak dapat memperoleh bukti-bukti pelanggaran yang dilaporkan dan terbukti (Hanser et al. 1991).

Selain itu, telah terjadi kekurangan dan / atau ketidakberlakuan mekanisme pemantauan khusus di tingkat nasional yang semakin memperumit kegiatan PMSCs dan identifikasi serta investigasi insiden yang tepat oleh kontraktor. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa pelanggaran kontraktor belum diteliti. Laporan dari lembaga asing dan internasional telah mendokumentasikan pelanggaran masa lalu yang dilakukan oleh kontraktor (Hanser et al. 1991). Namun, sebagian besar studi ini menganalisis pelanggaran kontraktor dari perspektif strategis, dan dengan demikian, umumnya tidak memberikan informasi rinci dan statistik yang memungkinkan menjawab pertanyaan mendasar mengenai dampak kegiatan PMSCs tentang hak asasi manusia, seperti apakah pelanggaran lebih tinggi di antara para kontraktor daripada di antara personil militer atau jumlah korban sipil yang timbul dari layanan tertentu (Hanser et al. 1991). Lebih lanjut, UNAMA telah menganggap perilaku PMSCs sebagai masalah khusus dan mengusulkan serta mengadvokasi peraturan nasional yang

memadai bagi mereka. Namun, berbeda dengan UNAMI di Irak, UNAMA dalam prakteknya hanya menyediakan dokumentasi terbatas terkait laporan penggunaan PMSCs.

Secara umum, tugas utama dari PMSCs di dalam misi-misi perdamaian PBB berkisar di seputar aspek proteksi konvoi / tempat, logistik, pelucutan senjata, dan penghapusan ranjau. Namun, perlu juga untuk dilihat apakah sebenarnya PMSCs secara legal boleh dikerahkan sebagai pasukan penjaga perdamaian. Di sisi yang lain, adanya PMSCs sendiri sebenarnya menyelesaikan salah satu masalah utama operasi pemeliharaan perdamaian: yaitu kurangnya jumlah personil pasukan dan keengganan anggota negara terhadap kontribusi pasukan perdamaian PBB. Dengan kata lain, negara-negara anggota hanya memberikan jumlah pasukan yang sangat rendah untuk pasukan perdamaian. Jumlah pasukan perdamaian PBB 2015 tercatat di angka: AS berjumlah 36 personil, Jerman 158, dan Inggris 284 tentara. Sebaliknya, komitmen tinggi justru ditunjukkan oleh beberapa negara berkembang: Bangladesh mengirimkan pasukan perdamaian sebanyak 8.078 personil, Ethiopia 7.712 dan Pakistan 8.234 personil (Isenberg 2002). Setelah Perang Dingin, berbagai negara cenderung mengurangi kontingen pasukan nasional mereka. Pada saat yang sama, lima negara permanen PBB juga berhenti untuk memveto di Dewan Keamanan yang menyebabkan jumlah operasi perdamaian meningkat dengan cepat dan dengan demikian meningkatkan kebutuhan dan permintaan untuk personel pasukan perdamaian (Isenberg 2003).

PBB menekankan fakta bahwa mereka hanya menyewa PMSCs yang mereka sewa hanya berwujud Perusahaan Keamanan Swasta, sebagaimana yang tercatat dalam UN Doc. A / 69/338, dan bukan tentara bayaran. Namun, perbedaan antara perusahaan keamanan dan militer disini tidak meyakinkan. Karena dalam prakteknya, perusahaan menawarkan berbagai tugas yang mencakup tugas keamanan dan militer pada saat yang sama dan tidak mungkin untuk menarik garis yang jelas antara dua kategori ini. Karena ini lebih tepat untuk menyatakan bahwa PBB menyewa PMSCs untuk melakukan tugas-tugas keamanan. Meskipun pada awalnya rilis informasi tentang penggunaan PMSCs oleh PBB sangat terbatas, jumlah dan frekuensi di mana informasi diberikan sekarang telah meningkat. Meskipun mereka merilis daftar kontraktor, mereka tidak menyebutkan tugas-tugas khusus yang PMSCs tersebut lakukan dibawah arahan PBB.

Pada Mei 2014, PBB tercatat mempekerjakan 30 PMSCs, yang melingkupi personel bersenjata dan bersenjata di UNAMA. Penggunaan personil bersenjata ini sebagaimana yang tercatat dalam UN Doc. A / 69/338 (Janowitz 2008). Pada 2013, PBB menandatangani kontrak tiga tahun dengan perusahaan Italia Selex terkait penggunaan drone, termasuk personel untuk pemeliharaan dan kontrol mereka. PBB menggunakan drone pengintai untuk penilaian yang lebih baik atas situasi yang kompleks, perlindungan penduduk sipil, perlindungan pasukan perdamaian, pemantauan embargo senjata dan pemantauan arus pengungsi di Afghanistan (Janowitz 2008). Selama UNAMA, PMSCs bernama "Pacific Architects and Engineers" juga hadir sebagai bagian dari kontrak dengan PBB untuk pengelolaan 11 lapangan udara. Mereka bertanggung jawab atas bagian penting dari misi, mengemudikan kendaraan dari personil dan perwakilan PBB, diakui sebagai pasukan penjaga perdamaian oleh penduduk setempat, menjadi sasaran aksi kekerasan dan mengorganisasikan evakuasi personil PBB (Janowitz 2008).

Ketika situasi di lapangan mulai genting dan pasukan pemelihara perdamaian ditarik. Personil PMSCs tetap berada di lapangan untuk memenuhi komitmen kontrak mereka. Penyebaran mereka mungkin digambarkan seperti perang, tetapi itu adalah bagoan dari kontrak pemeliharaan perdamaian mereka dengan PBB. Selama UNAMA pula, PBB juga didukung oleh DynCorp dengan helikopter dan komunikasi satelit (Kelly 2010). Secara total mereka menyewa lima PMSCs (antara lain DSL dan DynCorp). DSL menyediakan 425 karyawan yang berasal dari 24 negara, termasuk arsitek, mekanik, dan analis. DSL juga menyediakan mekanik dan supir untuk kendaraan bersenjata (Kemp dan Hudlin 2002). Dibandingkan dengan pasukan penjaga perdamaian dari PBB sendiri, personel PMSCs tetap di lapangan untuk jangka waktu yang jauh lebih lama. PMSCs membuat tawaran mengenai pengawasan udara berteknologi tinggi, yang memungkinkan mereka untuk memiliki kemampuan penyelamatan kemanusiaan yang cepat. PBB menolak tawaran itu di UNAMA.

Pengalihan tugas-tugas ini ke PMSCs dianggap tidak dapat diterima, khususnya karena reputasi mereka sebagai generasi baru tentara bayaran. Para PMSCs juga berhubungan dengan tingkat organisasi. Misalnya, Departemen Manajemen PBB menyewa sebuah perusahaan keamanan khusus untuk menentukan struktur Departemen Keselamatan dan Keamanan, sebagaimana tercatat di dalam UN Doc. A / 63/379. Bidang keterlibatan umum lainnya untuk PMSCs adalah penghapusan ranjau, seperti Olive Group, EODT Technologies, Armor Group dan Ronco disewa oleh PBB (Kemp dan Hudlin 2002).Terlebih lagi, PMSCs terlibat di garis terdepan dalam operasi pemeliharaan perdamaian. The US Global Peace Operations Initiative dikontrak mengenai pelatihan tentara kepada PMSCs. Dalam jumlah: Pada tahun 2009, 54.000 tentara dilatih oleh PMSCs, 45.000 dari mereka digunakan dalam operasi pemeliharaan perdamaian (Kemp dan Hudlin 2002).

Pada awalnya, PBB terutama mempekerjakan perusahaan lokal yang tidak bersenjata untuk melindungi personel mereka di Afghanistan, lalu kemudian dalam perkembangannya, baru mempekerjakan PMSCs bersenjata di lingkungan yang lebih kompleks di mana negara tuan rumah tidak mampu memberikan keamanan bagi pasukan pemelihara perdamaian. Operasi pemelihara perdamaian telah mengalami perubahan yang signifikan. Dimulai dengan misi pengamat di tahun 1940-an, di mana penggunaan kekuatan hanya diizinkan untuk membela diri, untuk misi pemeliharaan perdamaian yang kuat sesuai dengan Bab VII Piagam PBB dan berwenang untuk menggunakan semua sarana yang diperlukan. Sebagai hasil dari perkembangan itu, pasukan penjaga perdamaian sendiri menjadi sasaran aksi kekerasan.

Kendala Perserikatan Bangsa Bangsa dalam United Nations Missions Assistance in Afghaistan

Kurangnya jumlah personil pasukan dan keengganan anggota negara terhadap kontribusi pasukan perdamaian PBB. Negara-negara anggota hanya memberikan jumlah pasukan yang sangat rendah untuk pasukan perdamaian. Jumlah pasukan perdamaian PBB 2015 secara umum tercatat di angka: AS berjumlah 36 personil, Jerman 158, dan Inggris 284 tentara (O'Brien 2007). Sebaliknya, komitmen tinggi justru ditunjukkan oleh beberapa negara berkembang: Bangladesh mengirimkan pasukan perdamaian sebanyak 8.078 personil, Ethiopia 7.712 dan Pakistan 8.234 personil (O'Brien 2007). Pada prakteknya jumlah personil yang dimiliki PBB tidak mencukupi. Tidak hanya itu, personil yang diberikan oleh negara-negara berkembang dalam prakteknya juga hanya mencukupi kebutuhan kebutuhan untuk personil di medan konflik, tetapi tidak menyelesaikan permasalahan di bidang kebutuhan

personil untuk pengoperasian alat-alat teknis di lapangan, seperti drone dan pengintai, yang membutuhkan keahlian khusus. Personil yang dikirim oleh negara-negara anggota PBB dari negara berkembang tidak memiliki keahlian seperti itu, sehingga PBB memilih untuk menggunakan PMSCs yang memiliki anggota dengan kemampuan yang dibutuhkan oleh PBB dalam UNAMA.

Pengalaman untuk operasi perdamaian selama bertahun-tahun lebih merupakan masalah harapan daripada perencanaan dan pemrograman. Selanjutnya, ketika misi menjadi lebih kompleks, PBB merekrut lebih banyak spesialis dari luar sistem. Dalam hal kontrak PMSCs, layanan ahli yang lebih relevan termasuk intelijen, polisi sipil, penghapusan ranjau dan persenjataan serta perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi (DDR) dan SSR (Hukill 2004).

Selain itu, Perpaduan cakupan tugas yang diperluas PBB untuk tindakan dengan lingkungan operasi yang lebih tidak aman telah membuat intelijen semakin berharga untuk tugas seperti minimalisir risiko dan memandu aksi pasukan perdamaian, termasuk di operasi semacam UNAMA. Penyediaan intelijen dapat dianggap sebagai kegiatan yang terisolasi, tetapi dalam operasi perdamaian PBB lebih sering membentuk bagian yang terintegrasi dan penting dari perencanaan kegiatan sehari-hari dalam lingkungan yang kompleks. Pengembangan strategi untuk operasi militer, perlindungan personil dan perencanaan operasi kemanusiaan semuanya memerlukan penilaian risiko berdasarkan sejumlah tingkat kecerdasan atau informasi mengenai lingkungan keamanan. Masalahnya, PBB tidak memiliki tenaga yang memadai, sehingga PBB akhirnya menggunakan PMSCs sebagai tenaga intelijen yang handal (Larse 2008).

Selain itu, PMSCs juga dihadirkan di UNAMA untuk membangun stabilitas dalam rekonstruksi masyarakat pasca-konflik dalam bentuk pelatihan polisi lokal Afghanistan. Jumlah personil polisi yang dikerahkan dalam UNAMA tercatat telah meningkat. Pada bulan September 2011, PBB memiliki 14.310 polisi yang dikerahkan dalam total 15 misi pemeliharaan perdamaian di seluruh dunia, lebih dari dua kali lipat personil sejak September 2005, ketika jumlah misi sebenarnya lebih tinggi (17 misi) (Shraga 1998). Secara tradisional tugas utama kepolisian PBB terbatas pada pemantauan, pengamatan dan pelaporan, tetapi ini telah diperluas untuk memasukkan reformasi dan restrukturisasi kekuatan, pelatihan dan saran lokal, serta dalam beberapa kasus dengan asumsi tanggung jawab untuk penegakan hukum langsung. Sementara di sebagian besar misi, Polisi Sipil PBB tidak melaksanakan pemolisian eksekutif, tugas mereka umumnya berevolusi secara historis melalui apa yang dapat dibedakan menjadi lima fase, masing-masing mewakili lingkup dan kompleksitas yang meningkat. Fase pertama terbatas pada pemantauan, sementara yang kedua memperluas mandat dan kegiatan untuk memasukkan tanggung jawab untuk komponen pelatihan. Fase ketiga mewakili evolusi pelatihan untuk reformasi substansial dan restrukturisasi struktur kepolisian yang ada, kadang-kadang melibatkan pembentukan lembaga-lembaga baru.

Fase keempat UNCIVPOL diperpanjang untuk memasukkan unit-unit kosa kata khusus, dan fase terakhir mandat diperpanjang untuk memberi mereka wewenang eksekutif pada dasarnya tugas untuk memanggul senjata dan melakukan penangkapan. Sebagai bagian dari evolusi ini, PBB telah memperkenalkan unit-unit polisi yang dibentuk (Formed Police Units atau FPU), yang merupakan unit-unit kohesif yang terdiri dari unsur-unsur dari satu kontingen keamanan. Unit-unit ini

merupakan upaya untuk menutup celah keamanan antara penempatan personel militer dan polisi sipil. Mereka juga dimaksudkan untuk memungkinkan polisi lokal untuk dilatih sesuai dengan norma dan standar demokratis, dan dengan demikian menghindari paramiliterisasi polisi yang sering muncul dalam aksi kekerasan di lingkungan pasca-konflik.

PMSCs dalam aksinya merekrut sejumlah besar personel penegak hukum, dan polisi dan layanan keadilan telah lama menjadi bagian dari menu layanan inti mereka. DynCorp telah, sebagaimana disebutkan, melayani dalam UNAMA, dan DSL juga menyediakan pelatihan polisi di Afghanistan (Larse 2008). Baru-baru ini perusahaan telah digunakan untuk melakukan tugas yang sesuai dengan yang biasanya dilakukan oleh polisi nasional di Afghanistan dan Irak, yang sebagian mencerminkan evolusi dalam tugas-tugas CIVPOL yang dijelaskan di atas. Di Afghanistan, anak perusahaan Afghanistan dari perusahaan yang berbasis di London, IDG Security dilaporkan mendapat kontrak untuk menyediakan 169 Gurkha, diduga untuk melengkapi layanan yang disediakan oleh polisi Afghanistan (Shraga 1998). Demikian pula, Aegis dikontrak PBB untuk menyediakan keamanan publik selama referendum konstitusi Afghanistan dan pemilihan umum. Tentu ini menyebabkan batas-batas antara tentara PMSCs dan pasukan polisi semakin kabur. Praktik-praktik semacam itu dapat mempengaruhi moral kepolisian lokal dan dengan demikian berdampak pada proses SSR yang sedang berlangsung dan proses perdamaian yang terkait.

Menjelajahi berbagai perspektif tentang penggunaan PMSCs oleh PBB, keselamatan dan keamanan staf sipil PBB, termasuk manusia, berfungsi sebagai titik berangkat yang berguna. Namun, DSS, departemen yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan staf sipil PBB, membuat sedikit sekali informasi yang tersedia bagi publik mengenai praktik atau kebijakannya secara umum (Kolb dan Hyde 2008). Menurut sumber internal, ini karena kurangnya kebijakan dan prosedur yang jelas. Menemukan informasi yang koheren dan konsisten tentang pendekatan DSS pada kontrak PMSCs dengan demikian tidak realistis dan pedoman untuk kontrak keamanan tampaknya sebagian besar tidak ada. Prasyarat dan prosedur yang terbatas untuk kontrak PMSCs untuk layanan keamanan dapat ditemukan di lampiran pada Buku Panduan Keamanan Lapangan PBB (Kolb dan Hyde 2008). Hal-hal ini berlaku untuk situasi di mana strategi dasar pengendalian negara-tuan pertama PBB dianggap tidak efektif atau tidak memadai, yaitu banyak kasus di mana pemerintah tuan rumah tidak dapat memberikan pengaturan keamanan yang diperlukan untuk staf PBB. Buku panduan ini menyatakan bahwa 'di bawah keadaan yang langka dan luar biasa seperti itu, PBB dapat melindungi kantor, tempat dan personel mereka dengan mempekerjakan PMSCs yang menyediakan penjaga bersenjata. Ini menunjukkan bahwa penggunaan PMSCs sama sekali tidak dilarang oleh PBB.

Menghalangi Latihan Hak-hak Rakyat untuk Penentuan Nasib Sendiri. Mandat kelompok kerja dibentuk pada Juli 2005 oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB dan menggantikan pelapor khusus. Posisi pelapor khusus pertama kali didirikan pada tahun 1989 dan dipegang oleh Enrique Bernales Ballesteros hingga tahun 2004 (Zwanenburg 2008). Ballesteros sebagian besar menyamakan industri PMSCs awal dengan tentara bayaran, dan memperingatkan bahwa ketergantungan PMSCs memiliki konsekuensi yang merugikan bagi penentuan nasib sendiri nasional dan juga dapat merusak hak asasi manusia dasar untuk populasi. Pandangan yang dipegang oleh pelapor khusus telah digambarkan sebagai sangat dipengaruhi oleh posisi normatif 'puritanical' terhadap penggunaan tentara bayaran yang pada dasarnya

mengaburkan fakta-fakta tentang aksi militer swasta. Ballesteros gagal membedakan antara tentara bayaran yang mendukung kelompok separatis di Katanga dan Biafra pada 1960-an dan 1970-an, dan perusahaan seperti Eksekutif Hasil dan Sandline Internasional, yang dipekerjakan untuk mendukung kedaulatan negara pelanggan. Pelapor khusus berikutnya, Shaista Shameen, mengambil pendekatan yang lebih pragmatis, mengakui bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa bergantung pada layanan PMSCs dari waktu ke waktu dan menyerukan kepada industri untuk terlibat dalam pengaturan regulasi dan standar diri. Jangka waktu Shameen sebagai pelapor khusus dengan pembentukan kelompok kerja pada tahun 2005.

Kelompok kerja dalam beberapa tahun terakhir menempatkan fokus khusus pada PMSCs dan melakukan beberapa kunjungan ke Afghanistan dan Amerika Serikat untuk memantau kinerja PBB dalam UNAMA. Hasil dari pemantauan tersebut melihat bahwa PMSCs mewakili bentuk baru dari tentara bayaran. Mungkin berbeda dengan namanya, fokus kelompok kerja tampaknya sebagian besar tetap pada implikasi PMSCs terkait monopoli kekerasan negara, dan agak kurang pada pelanggaran hak asasi manusia. Ilustrasi dari perspektif ini, untuk mengatasi meningkatnya prevalensi PMSCs, kelompok kerja terus mendesak negara-negara untuk meratifikasi Konvensi Internasional yang sebagian besar tidak berhasil terhadap Rekrutmen, Penggunaan, Pembiayaan dan Pelatihan Tentara Bayaran (Zwanenburg 2011).

Simpulan

PMSCs merupakan bentuk bisnis baru yang memanfaatkan konsep keamanan dan ketahanan sebagai sumber bisnis utama mereka. Dalam hal ini, PMSCs menjanjikan keamanan bagi kliennya dengan cara penyediaan jasa pasukan dan tenaga ahli yang bergerak di bidang keamanan, baik langsung secara militeristik di medan perang, maupun yang berkaitan dengan keamanan di tingkat lokal. Berkaitan dengan hal itu, PMSCs dalam perkembangannya banyak digunakan oleh negara-negara sebagai tambahan personil serta sebagai tenaga pelatih untuk tentara-tentara mereka. Masalahnya, PMSCs sebagai bagian dari keamanan ternyata tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Ini dikarenakan PMSCs yang memiliki ruang lingkup kerja yang luas, mulai dari menjadi personil tambahan, hingga tenaga profesional dan pelatih, sehingga hukum maupun konvensi yang ada tidak bisa mengekang PMSCs secara menyeluruh. Ini juga mematahkan anggapan bahwa bahwa PMSCs merupakan wujud baru dari tentara bayaran atau mercenaries, karena bahkan PMSCs juga menyediakan jasa untuk pengoperasian dan penyewaan drone, pengelolaan logistik dan bodyguard selama di lapangan, yang mana sama sekali tidak berhubungan dengan kontak senjata secara langsung di medan perang.

Salah satu penggunaan PMSCs ini terlihat di Perang Afghanistan, yang mana salah satu aktor yang mengontrak PMSCs ini adalah PBB. Sebagai organisasi antarnegara yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, termasuk di masa perang, tindakan ini banyak mendapat kecaman dari pihak-pihak internasional karena mereka beranggapan bahwa PMSCs merupakan bentuk baru dari tentara bayaran dan aksi-aksi yang mereka lakukan di medan perang berpotensi untuk melanggar hukum-hukum perang yang ada. Ini diperkuat dari fakta yang ada bahwa banyak kasus-kasus yang mengindikasikan adanya pelanggaran hukum perang oleh PMSCs yang disewa oleh negara-negara dalam perang. PMSCs digunakan untuk melakukan pekerjaan kotor, termasuk membunuh dan menginterogasi tahanan perang dengan cara-cara yang kejam.

PBB terbukti menggunakan PMSCs di UNAMA. PBB melakukan kontrak dengan PMSCs seperti Aegis dan DSL, dan mengontrak mereka untuk menjadi personil tambahan selama UNAMA berlangsung. Ruang lingkup UNAMA dan operasi perdamaian pada umumnya yang luas dan membutuhkan pasukan dan SDM lain dalam jumlah besar dan kondisi lapangan yang penuh resiko baik bagi warga sipil maupun pasukan perdamaian telah memberikan tekanan tinggi pada PBB untuk menyelesaikan UNAMA. Faktor-faktor ini menciptakan ruang bagi pemanfaatan potensi yang besar dalam kapasitas operasional dalam aspek keamanan yang dimiliki oleh PMSCs. Dengan secara kritis memeriksa penggunaan PMSCs oleh PBB, penelitian ini menyoroiti bagaimana komersialisasi keamanan telah menyematkan diri ke dalam kegiatan PBB di Afghanistan, dan di operasi perdamaian di kawasan-kawasan lain.

Pada hakikatnya, adalah yang seharusnya bertindak untuk mempromosikan pembangunan dan perdamaian. Meskipun banyak perhatian telah diberikan kepada layanan keamanan, PMSCs pada kenyataannya menyediakan berbagai layanan lain untuk PBB, yang tidak semuanya bisa dipenuhi oleh tentara perdamaian yang disuplai oleh negara-negara anggota. Ini termasuk dukungan dan logistik serta layanan yang lebih khusus seperti polisi sipil, ranjau dan intelijen. Contoh-contoh empiris menunjukkan bahwa PBB tidak hanya menyewa layanan yang mengatasi masalah kekurangan pasokan tenaga ahli (seperti penghapusan ranjau atau logistik), tetapi juga kapasitas dan teknologi perusahaan dilengkapi dengan personel semacam itu, yaitu PMSCs itu sendiri. Di daerah-daerah di mana PBB memainkan peran utama (seperti dalam program DDR dan SSR), kekurangan atau konteks yang sulit membutuhkan personil kontraktor dari industri PMSC. Penelitian ini juga mengilustrasikan bahwa kontrak PMSCs bukanlah praktik yang terisolasi yang dilakukan oleh anggota tertentu dari keluarga PBB; tetapi tampaknya menjadi praktik umum dari banyak lembaga, dana, program, departemen, tim negara, dan stasiun tugas lokal yang menjadi bagian dari UNAMA.

Dalam penggunaan PMSCs di UNAMA, masih ada beberapa pengakuan bahwa kebijakan umum diperlukan, setidaknya dalam hal kontrak keamanan. Belum ada upaya mempertimbangkan pendekatan yang berbeda untuk mengganti praktek penyewaan PMSCs ini. Sementara kebijakan baru yang disarankan oleh Sekretariat Komite Kebijakan atas dasar prakarsa DSS. dapat disambut baik di beberapa divisi, kemungkinan akan menghadapi resistensi yang cukup besar di bagian lain organisasi, dan apakah kesepakatan dan kepatuhan dapat dicapai pada masalah sensitif seperti itu tidak pasti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Janowitz, Morris, (2008). *The Professional Soldier: a Social and Political Portrait*. New York: Free Press
- Kolb R, and Hyde R (2008), *An Introduction to the International Law of Armed Conflicts*. Hart Publishing
- Oswald, Bruce Durham, Helen Bates, Adrian (2010). *Documents on the Laws of UN Peace Operations* Oxford: Oxford University Press

Jurnal :

- Hanser, Lawrence, Davidson, Joyce, and Stasz, Cathleen (1991), *Who Should Train? Substituting Civilian Provided*
- Hukill T, 'Should Peacekeepers Be Privatized?' (2004) 36 *National Journal* 1526.
- Isenberg, David, (2002). "Regulated Private Military Firms have a Role," *Defense News*
- Kelly, J (2010), "Safety at a Price: Security is a Booming, Sophisticated, Global Business," *Pittsburgh Post-Gazette*
- Kemp, K. W. and Hudlin, Charles (2002), "Civil Supremacy Over the Military: Its Nature and its Limits," *Armed Forces and Society* Vol. 19, No. 1.
- Larse K (2008), 'Attribution of Conduct in Peace Operations: the "Ultimate Authority and Control" Test'. *The European Journal of International Law*
- Lilly, Damian (2000). "The Privatization of Peacekeeping: Prospects and Realities" *Disarmament Forum* (3)53 ff
- O'Brien K (2007), 'What Should and What Should Not Be Regulated?' in Simon Chesterman and Chia Lehnardt (eds), *From Mercenaries to Market: The Rise and Regulation of Private Military Companies*
- Østensen, Åse Gilje (2013). "In the Business of Peace in International Peacekeeping" *International Peacekeeping* 20(1) P.33
- Pingeot, Lou. (2011). Interview with former UNAMA Political Affairs Officer.
- Ross, Alice (2016). "UK firm 'employed former child soldiers' as mercenaries in Iraq". *The Guardian*. London. Retrieved 17 April 2016
- Shraga D (1998), 'The United Nations as an Actor Bound by International Humanitarian Law'. *International Peacekeeping*
- Wulf, Herbert (2005). "Internationalisierung und Privatisierung von Krieg und Frieden". Baden-Baden: Nomos Verlag.
- Zwanenburg M (2011), 'International Organisations vs Troops Contributing Countries: Which Should be Considered as the Party to an Armed Conflict during Peace Operations?', *International Organizations' Involvement in Peace Operations: Applicable Legal Framework and the Issue of Responsibility*. 12th Bruges Colloquium, ICRC-COE.

Artikel Online :

- Jordan, Michael J. (2018). *Why you won't see UN blue helmets in Afghanistan* [online]. Tersedia di : <https://www.csmonitor.com/2001/1218/p7s1-wogn.html>. Diakses pada 15 Agustus 2018